



URGENSI MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Tri Velyna

STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

Email : velynatri@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
22 Mei 2025	31 Mei 2025	31 Mei 2025

Keywords:

Management
Guidance
Counseling

ABSTRACT

In addition to misconceptions in guidance and counseling activities, problems also occur in guidance and counseling services in schools, related to the management of guidance and counseling, which is not yet optimal. This is illustrated based on phenomena that occur in schools, including lack of student needs analysis, unclear objectives of BK activities, absence of structured BK programs, high workload of BK teachers, limited facilities and infrastructure, lack of cooperation with subject teachers and parents, lack of BK teacher competence, irregular evaluation, absence of feedback mechanisms. The implementation of guidance and counseling programs in schools will not run smoothly without effective guidance and counseling management. This study aims to explain narratively the importance of management in implementing guidance and counseling services in schools. The approach in this study uses a qualitative approach with a type of library research. The results of the discussion show that the implementation of guidance and counseling services in schools needs to use the POAC management principle, which includes planning, organizing, actuating, and controlling, and the need for cooperation with all school stakeholders.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Manajemen
Bimbingan
Konseling

Selain miskonsepsi dalam pelayanan bimbingan dan konseling permasalahan yang dapat terjadi dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu terkait dengan manajemen bimbingan konseling yang belum maksimal hal ini tergambarkan berdasarkan fenomena yang ada antara lain kurangnya analisis kebutuhan siswa, tujuan kegiatan BK yang belum jelas, tidak adanya program BK yang terstruktur, beban kerja guru BK yang tinggi, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kerjasama, kurangnya kompetensi guru BK, evaluasi yang tidak teratur, tidak adanya mekanisme umpan balik. Penyelenggaraan program BK di lingkungan sekolah tidak dapat terselenggara dengan optimal tanpa adanya pengelolaan manajemen yang bermutu di sekolah. Tujuan penelitian mendeskripsikan secara naratif akan pentingnya pengelolaan manajemen dalam melaksanakan layanan BK di sekolah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Hasil pembahasan bahwasannya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu menggunakan prinsip manajemen POAC yaitu

diantaranya terdiri dari Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) serta perlunya kerjasama kepada seluruh stakeholder sekolah.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pembelajaran dimana seseorang dapat memperoleh sumber pengetahuan, sikap, serta keterampilan dalam menjadikan individu mencapai kedewasaan sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan memperoleh keterampilan baru dalam kehidupan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.¹

Seluruh personil sekolah mempunyai kewajiban dalam mendukung tujuan dari pendidikan melalui kegiatan pembelajaran yang bermutu, mendidik siswa dalam menanamkan karakter cerdas dalam diri, menjadi tauladan serta memberikan motivasi kepada siswa sehingga dapat berkembang secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu siswa agar dapat berkembang dari segi emosional, pribadi, sosial, maupun akademik. Sehingga, peran bimbingan dan konseling sangat penting dalam ikut serta mencapai tujuan dari pendidikan yang diharapkan dapat tercapai, bimbingan dan konseling menjadi satu kesatuan dalam upaya pemberian pelayanan Pendidikan yang efektif dan efisien bagi peserta didik di sekolah.² Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari program pendidikan yang membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mortensen & schmuller dalam Ali, dkk. bahwa: *Guidance may be defined as that part of the total aducational program that helps provide the personal opportunities and specialized staff services by which each individual can develop to the fullest of his abilities and capacities in terms of the democratic idea.*³

Menurut Pasal 1 Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya, Adapun pelaksanaan layanan

¹ R I Undang-Undang, *Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Metode Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar*, Bandung: Citra Umbara (Bandung: Cintra Umbara, 2012), 13.

² S Mutia, “Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Disekolah,” *Intelektualita*, 2021.

³ Donald G Mortensen and Allen M Schmuller, *Guidance in Today's Schools*. (new york: John Wiley, 1959), 74.

bimbingan dan konseling di satuan Pendidikan mencakup: 1) Program BK terdiri atas empat komponen utama yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsive dan dukungan sistem. 2) bidang layanan bimbingan dan konseling, meliputi: pribadi, sosial, belajar/akademik dan bidang karir, 3) strategi pelayanan yaitu: individu, kelompok, klasikal, lintas kelas, 4) kualifikasi Pendidikan Guru BK/Konselor sekolah minimal Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan rasio 1 Guru BK menangani 150 siswa 1:150, 5) Program BK dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan siswa serta dituangkan dalam program tahunan, semesteran, bulanan dan harian. Evaluasi dilaksanakan agar dapat mengukur seberapa besar keberhasilan layanan BK serta merancang terkait pengembangan program BK lebih lanjut agar pelayanan BK dapat mencapai tujuan.⁴

Siraj mengemukakan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang termanajemen dengan baik akan lebih terstruktur dan terarah sesuai aturan, norma, hukum yang berlaku.⁵ Kemampuan manajer pendidikan di sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan serta mengevaluasi sumber daya yang ada akan melahirkan sebuah manajemen bermutu. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling sebaiknya dirumuskan secara matang dan professional dari segi perencanaan program maupun pelaksanaannya, menganalisis yang dibutuhkan siswa, materi diberikan kepada siswa bersifat komprehensif dan sistematis.⁶ Namun fenomena yang terjadi saat ini dilingkungan pendidikan khususnya pada pelaksanaan manajemen BK banyak terdapat kendala, yang biasanya sering terjadi yaitu keterbatasan jumlah guru BK yang belum ideal yaitu 1:150 siswa sehingga hal tersebut mengakibatkan guru BK hanya dapat melaksanakan kegiatan BK yang bersifat insidental saja, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta sebagian besar guru BK masih belum mempunyai jam khusus masuk ke kelas, Guru BK sering dibebani tugas-tugas tambahan (misalnya: piket, pengawasan, tugas akademik) yang tidak berhubungan dengan fungsi BK sehingga ini juga dapat membuat Guru BK kurang fokus dalam menyusun dan melaksanakan tugas BK secara menyeluruh, temuan penelitian selanjutnya yaitu penelitian Wardani, Nur dkk dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian guru BK yang ada di SMA Negeri se-Kota Bandung berada pada kategori kompeten dalam melaksanakan kegiatan BK di sekolah.⁷

Perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen yang meliputi (1) asesmen lingkungan, yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat (orangtua peserta didik), sarana dan prasarana pendukung program bimbingan dan konseling, kondisi dan kualifikasi konselor serta kebijakan pimpinan sekolah, dan (2) asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakter peserta didik seperti aspek fisik (kesehatan dan keberfungsian), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya (pekerjaan, jurusan, olahraga, seni dan keagamaan), masalah-masalah yang dialami dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangan sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling⁸ Pengorganisasian bimbingan dan konseling harus dirancang dengan baik karna ini berkaitan dengan penempatan personel bimbingan dan konseling serta

⁴ Edris Zamroni and Susilo Rahardjo, "Manajemen Bimbingan Dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014," *Jurnal Konseling Gusjigang* 1, no. 1 (2015): 0–11.

⁵ S Pd Siraj, *Profesi Pendidikan: Tinjauan Teoritik Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru* (PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2022).

⁶ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 63.

⁷ Nurnaifah Selvia Wardhani, Euis Farida, and Eka Sakti Yudha, "Profil Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling SMA Di Kota Bandung," *Indonesian Journal of Educational Counseling* 3, no. 2 (2019): 147–54.

⁸ R I Depdiknas, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor Dan Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal* (Jakarta: Cipta Jaya, 2008), 220.

pembagian tugas yang tepat. Dalam SK Menpan No. 84/1993, Prayitno menegaskan bahwa tugas pokok guru bimbingan dan konseling adalah: Menyusun program BK, melaksanakan program BK, analisis hasil pelaksanaan BK, dan tindak lanjut serta yang menjadi personel utama pelaksanaan program BK yaitu konselor sekolah/guru BK.⁹Permendikbudristek 46/2023 memperkuat peran Guru BK sebagai bagian penting dalam dunia Pendidikan terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Guru BK terlibat dalam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK): Satuan pendidikan diwajibkan membentuk TPPK yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru BK, Guru lainnya, dan tenaga kependidikan. Guru BK memberikan layanan konseling kepada korban, saksi, atau pelaku kekerasan yang berstatus peserta didik. Pendampingan ini mencakup konseling individu, kelompok, serta bimbingan sosial dan rohani.¹⁰

Fenomena dilapangan bahwa kenyataannya, pelayanan BK yang dilaksanakan oleh Guru BK di sekolah belum sesuai dengan yang diharapkan, temuan penelitian Permana bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, hanya dapat dilaksanakan ketika ada jam kosong, kecuali untuk kelas XII diberikan waktu 1 jam dalam seminggu untuk guru BK dapat masuk kelas memberikan materi layanan terkait studi sekolah lanjut, fenomena yang diungkapkan ini termasuk dalam jenis permasalahan manajemen dalam segi waktu untuk pelayanan bimbingan dan Konseling.

Memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang merupakan tujuan dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah¹¹, Namun, penerapan layanan bimbingan dan konseling yang ideal menghadapi berbagai hambatan dan kendala serius. Hambatan ini meliputi: ketidaksesuaian tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan, orientasi bimbingan dan konseling yang masih berfokus pada masalah, penyusunan program yang belum didasarkan pada penilaian kebutuhan (*needs assessment*), kurangnya dukungan dari pejabat sekolah terhadap program bimbingan dan konseling, pemahaman yang belum memadai mengenai paradigma kolaborasi antar profesi dalam satuan pendidikan, serta kurangnya respons positif dari peserta didik terhadap layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang berkembang di Indonesia selama ini lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif dan klerikal, seperti mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa, mengenakan sanksi disiplin pada siswa yang terlambat dan dianggap nakal.¹²

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis akan menganalisis mengenai urgensi manajemen bimbingan dan konseling yang kaitannya dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

⁹ H Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan Dan Konseling Disekolah* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2001), 70.

¹⁰ dan Teknologi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan,” 2023.

¹¹ Ipah Ipah Saripah, “Fungsi Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Pesantren Persatuan Islam (Penelitian Di Pesantren Persatuan Islam No 19 Bentar Garut)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

¹² Lia Mita Syahri et al., “Kesiapan Konselor Dalam Proses Konseling Yang Berhasil,” *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 2, no. 2 (2022): 82–91.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis studi literatur, penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya merupakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹³ Berdasarkan karakteristiknya maka penelitian kepustakaan tergolong dalam metode penelitian kualitatif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku manajemen bimbingan dan konseling serta hasil penelitian yang relevan di jurnal-jurnal ilmiah. Untuk analisisnya dalam penulisan artikel ini menggunakan analisis isi yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Manajemen Bimbingan dan Konseling

Manajemen merupakan aspek esensial dalam mencapai dari tujuan pelaksanaan layanan BK di sekolah, melalui pelaksanaan manajemen Guru BK dapat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kolaborasi kepada *stakeholder* serta terwujudkan program bimbingan dan konseling yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 diterbitkan sebagai pedoman baru untuk pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengendalian.¹⁵ Pelayanan bimbingan dan konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan perspektif baru mengenai manajemen bimbingan dan konseling dimana ada kolaborasi antara Pola 17 plus yang berfokus pada 9 jenis layanan yakni: layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, mediasi dan konsultasi serta dilengkapi dengan kegiatan pendukung BK, dan BK komprehensif yang mana berfokus pada perkembangan peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian Habsy pengadopsian pola pelayanan bimbingan dan konseling yang komprehensif, dikombinasikan dengan pola 17 plus membuat beberapa pihak merasa bingung tentang pola mana yang harus diikuti yang mana pola 17 plus sudah lama diterapkan di sekolah.¹⁶

Program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat disusun, dilaksanakan, atau mencapai hasil yang diinginkan tanpa dikelola dalam sebuah sistem manajemen yang berkualitas, jika berfungsi secara optimal, bimbingan dan konseling dapat menangani semua kebutuhan dan masalah siswa di sekolah dengan efektif.¹⁷ Menurut Neviarni adapun yang menjadi tolak ukur sebuah manajemen BK dapat dikatakan berkualitas meliputi: perencanaan yang matang dan komprehensif, diorganisasi dengan baik, dilaksanakan secara Bersama dan professional serta menyenangkan, harus dilaksanakannya kontrol atau evaluasi tentang pelaksanaan layanan BK di sekolah.¹⁸

Manajemen bimbingan dan konseling melibatkan segala usaha atau metode yang diterapkan untuk memanfaatkan secara maksimal semua elemen atau sumber daya, seperti

¹³ Sutrin Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

¹⁴ Albi. Johan Setiawan Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

¹⁵ Zamroni and Rahardjo, "Manajemen Bimbingan Dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014."

¹⁶ Bakhrudin All Habsy et al., "Memahami Konsep Manajemen BK Dengan Melihat Pola Organisasinya Di Sekolah," *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 329–45.

¹⁷ Sumarto Sumarto, "Manajemen Konseling Sekolah Dalam Mengatasi Masalah Siswa Di Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Hidayatullah Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Pendidikan Guru* 5, no. 1 (2024).

¹⁸ S Neviarni, *Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (Konsep, Masalah Dan Solusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2023).

tenaga kerja, dana, dan sarana prasarana, serta sistem informasi yang mencakup data bimbingan dan konseling, guna melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Manajemen bukan hanya mengatur tempat, melainkan lebih dari itu adalah mengatur orang perorangan sehingga diperlukannya seni yang sebaik-baiknya dalam penerapannya serta harus memiliki beberapa prinsip yang dapat mendukung keberhasilan sebuah manajemen yaitu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang ketat. Untuk menerapkan prinsip tersebut perlunya seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dalam pengembangan sebuah organisasi.

Menurut Prayitno pengelolaan layanan bimbingan dan konseling juga melibatkan kerja sama dengan orang lain untuk menentukan, menafsirkan, dan mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, perancangan, dan pengarahan, serta pengawasan.²⁰

3.2 Urgensi Manajemen dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah yang masih belum ideal dapat disebabkan oleh minimnya manajemen BK yang bermutu, diantaranya yakni pelaksanaan supervisi dimana penyelenggaraan supervisi bimbingan dan konseling belum sesuai dengan ketentuan dalam supervisi bimbingan dan konseling, sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh Mariam Harim dkk yaitu 1) 5% Guru BK menyatakan disupervisi oleh supervisor yang tidak memiliki latar belakang keilmuan bimbingan dan konseling, (2) supervisi lebih menekankan pada aspek administrasi layanan, (3) supervisi lebih banyak menggunakan metode tanya jawab, (3) supervisor cenderung tidak mengamati langsung penampilan Guru BK pada saat melaksanakan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok, (4) supervisor cenderung kurang memberikan informasi tentang kemutakhiran perkembangan pelayanan, (5) sebagian besar supervisor tidak memberikan contoh-contoh teknik layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengaktifkan siswa (konseli) pada saat layanan, dan (6) supervisor cenderung tidak melaksanakan supervisi klinis. sehingga situasi ini harus dicarikan solusinya, salah satunya dengan meningkatkan pemahaman terkait manajemen BK yang sebaiknya di aplikasikan di sekolah, Adapun komponen utama dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menurut Neviarni meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi serta akan diuraikan sebagai berikut:²¹

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang dimaksud dalam bimbingan dan konseling adalah suatu proses untuk menyusun kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dengan menggunakan dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan perencanaan. Perencanaan harus dilakukan secara matang, efisien, dan sistematis. Dalam hal ini perencanaan akan membuat sebuah kegiatan lebih terarah dan berjalan sesuai sasaran yang akan dicapai.²² Agar lebih jelas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

¹⁹ Asni Asni, Dwi Dasalinda, and Dini Chairunnisa, "Penerapan Fungsi Manajemen Poac (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah," *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 9, no. 1 (2024): 357–64.

²⁰ Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling (Pendidikan Profesi Konseling)* (Padang: FIP UNP, 2012).

²¹ Neviarni, *Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (Konsep, Masalah Dan Solusi)*.

²² David Adi Saputra et al., "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Mengelola Perpustakaan Di SMK Negeri 2 Sangatta Utara," *An-Nadzir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 01, no. 01 (2023): 24–37.

Tabel 1. Perencanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling

Aspek	Sub Aspek	Kegiatan
Perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah	Tahapan persiapan (<i>preparing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asesmen kebutuhan <ol style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi data yang dibutuhkan b) Memilih instrumen yang akan digunakan c) Mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen 2. Mencari dukungan kepada personal sekolah dan wali murid 3. Menetapkan dasar perencanaan program
	Tahapan perancangan (<i>designing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling <ol style="list-style-type: none"> a) Merumuskan rasional b) Dasar hukum c) Merumuskan visi dan misi d) Deskripsi kebutuhan e) Merumuskan tujuan f) Menentukan komponen program g) Mengidentifikasi bidang layanan h) Menyusun rencana operasional i) Pengembangan tema j) Rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut k) Menyusun anggaran biaya 2. Penyusunan program semesteran, dikembangkan berbasis pada rencana oprasional yang telah disusun sebelumnya

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling meliputi tentang bagaimana pengelolaan dan pengorganisasian bimbingan dan konseling. Sarana dan prasarana penting untuk diusahakan dikarenakan faktor ini sebagai penentuan siap atau tidak siapnya proses pelayanan bimbingan dan konseling. Secara operasional, pelaksanaan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah para guru BK atau konselor sekolah di bawah koordinasi seorang koordinator bimbingan dan konseling, namun, bimbingan dan konseling di sekolah perlu adanya kolaborasi dengan personal sekolah lainnya, tiap-tiap personal yang terlibat dalam organisasi bimbingan dan konseling, tentunya memiliki tugas serta tanggung jawab dalam mensukseskan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut adalah tugas dari tiap-tiap personal dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah:

Tabel 2. Tugas dan Tanggung Jawab Personal Sekolah

No	Personal Sekolah	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kepala sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi semua kegiatan sekolah termasuk bimbingan dan konseling di sekolah 2. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BK di sekolah

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengusakan tersedianya fasilitas 4. Mengawasi serta mengevaluasi kegaitan BK di sekolah 5. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa, bagi kepala sekolah yang berlatarbelakang bimbingan dan konseling 6. Menjalin kerjasama dengan pihak/instansi, seperti dinas kesehatan, kepolisian, serta kementerian agama atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan BK seperti psikolog, psikiater, atau dokter.
2 Wakil Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepala semua personil sekolah 2. Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan BK 3. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa, bagi kepala sekolah yang berlatarbelakang bimbingan dan konseling
3 Koordinator BK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan para guru BK dalam menyusun program, melaksanakan, mengadministrasikan, penilaian dan tindak lanjut. 2. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya sarana dan prasarana 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah
4 Guru BK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempromosikan kegiatan mentoring dan konsultasi (khusus untuk peserta didik) 2. Merencanakan persiapan program BK dengan koordinator BK 3. Melakukan persiapan kegiatan 4. Menjalankan layanan BK untuk peserta didik 5. Mengevaluasidan menganalisis pelayanan program BK serta menindak lanjuti hasil evaluasi dan analisis layanan 6. Mengelola kegiatan BK 7. Bertanggungjawab atas tugas dan kegiatan BK kepada koordinator ataupun kepala sekolah 8. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah 9. Bertanggungjawab dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik dengan perbandingan 1:50
5 Staf administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu koordinator dan guru BK dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan BK di sekolah 2. Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan BK 3. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BK
6 Guru matapelajaran dan wali kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam memasyarakatkan layanan BK 2. Melakukan Kerjasama dengan guru BK dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan 3. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan BK 4. Mengadakan Upaya tindak lanjut layanan

	5. Ikut serta dalam program BK ²³
7 Kandeptiknas/ahli lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah 2. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada guru BK 3. Bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program BK 4. Mengkoordinasi segala bentuk kerjasama antara sekolah dengan berbagai instansi ataupun pihak eksternal yang terlibat 5. Membantu sekolah dalam menjalin hubungan baik dengan orangtua dan Masyarakat 6. Memberikan evaluasi terkait efektivitas program pelayanan BK di sekolah, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan 7. Laporan berkala tentang pelaksanaan program BK dan menyampaikan kepada pihak terkait
8 Komite sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelatihan layanan BK bagi seluruh personil sekolah 2. Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan BK 3. Mengkoordinasikan segala bentuk pelayanan, program serta administrasi guru BK 4. Mengevaluasi atau menilai program yang telah dirancang 5. Mengadakan tindak lanjut 6. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana 7. Mempertanggungjawabkan kegiatan BK kepada kepala sekolah. 8. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi layanan BK.²⁴

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada proses ini melibatkan seluruh personil yang ada guna mencapai tujuan berdasarkan aturan dan kebijakan yang telah diorganisasikan sebelumnya. Berbagai macam tindakan atau kegiatan yang dapat memungkinkan seluruh tugas dijalankan dengan seluruh personil inilah yang disebut dengan proses penggerakan atau pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang telah tersusun. Apabila ditilik dari tanggung jawab guru BK yang mengemban 24 jam pelajaran per minggunya maka apabila rata-rata guru BK dapat melaksanakan kegiatan konseling yang ekuivalen dengan 2 jam pelajaran maka ada 12 kegiatan konseling yang dilaksanakan di kelas dan diluar kelas. Terkadang Guru BK mendapat kelebihan beban kerja diakibatkan jumlah guru BK yang tidak sesuai dengan rasio 1:150. Sehingga ada kemungkinan lebih dari 12 kegiatan konseling yang dilakukan dalam seminggu. Oleh karena itu akan lebih baik ada program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Pelaksanaan kegiatan BK di sekolah meliputi:

²³ Tri Velyna Khusnul Wardan, *Bimbingan Dan Konseling* (Bandung: Mujahid Press, 2018).

²⁴ Habsy et al., "Memahami Konsep Manajemen BK Dengan Melihat Pola Organisasinya Di Sekolah."

a. Layanan Dasar

Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui kegiatan penyiapan, pengalaman terstruktur yang dilaksanakan dengan format klasikal atau kelompok. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilakukan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian). Adapun kegiatan yang mencakup dari layanan dasar yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, layanan orientasi, layanan Informasi, pengumpulan data.

b. Perencanaan Individual dan Peminatan Peserta Didik

Kegiatan bimbingan dan konseling dalam hal perencanaan dan peminatan peserta didik merupakan program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Strategi layanannya adalah penilaian individual (*self-evaluation*), bantuan individual/kelompok dalam merencanakan tujuan, melakukan kegiatan dan mengevaluasi, penempatan/penjurusan/penyaluran.

c. Pelayanan Responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif antara lain konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (*referral*). Strategi layanan pada komponen program ini adalah Konsultasi, Konseling Individual/Kelompok, Konferensi kasus, Referral, Bimbingan Teman Sebaya

d. Dukungan Sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik/konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang termasuk dalam kegiatan komponen program ini adalah pengembangan profesional, manajemen program dan penelitian.²⁵

4. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling yang biasanya dikenal sebagai pengawasan merupakan tahap terakhir dalam sebuah manajemen begitupun juga manajemen bimbingan dan konseling yang mana berfokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dari bimbingan dan konseling. Proses ini mengawasi dan menilai kegiatan bimbingan dan konseling mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaan bimbingan dan konseling yang meliputi layanan dan kegiatan pendukung BK serta administrasi pelayanan BK. Adapun tugas supervisi atau pengawas BK di sekolah menurut Neviarni sebagai berikut:

1. Perencanaan Program supervisi

- a. Menyusun program supervisi berdasarkan kebutuhan konselor/guru BK.
- b. Menentukan jadwal, metode, dan instrumen supervisi.
- c. Mengidentifikasi area yang perlu dibina (perencanaan layanan, pelaksanaan, evaluasi, dll).

2. Melaksanakan Supervisi

- a. Mengobservasi pelaksanaan layanan BK di sekolah.

²⁵ Abu Bakar M Luddin, *Dasar Dasar Konseling* (Perdana Publishing, 2010).

- b. Menganalisis dokumen program BK (seperti program tahunan, program semester, jurnal harian).
 - c. Memberikan umpan balik secara langsung dan konstruktif.
 - d. Melakukan kunjungan kelas (jika ada layanan klasikal) atau observasi layanan konseling.
3. Membina dan Membimbing Konselor
 - a. Memberikan saran perbaikan dalam aspek teknis maupun etis layanan BK.
 - b. Membantu konselor meningkatkan keterampilan profesional (misal: teknik konseling, pengelolaan program, penggunaan instrumen asesmen).
 - c. Mendorong pengembangan diri melalui pelatihan, seminar, workshop, atau studi lanjut.
 4. Mengevaluasi Kinerja Layanan BK
 - a. Menilai sejauh mana program BK terlaksana sesuai rencana.
 - b. Menggunakan instrumen evaluasi (rubrik, checklist, atau format observasi) secara sistematis.
 - c. Menganalisis hasil supervisi untuk melihat kekuatan dan kelemahan layanan.
 5. Memberikan Tindak Lanjut
 - a. Menyusun laporan hasil supervisi dan menyampaikannya kepada pihak terkait.
 - b. Menyusun rekomendasi perbaikan layanan.
 - c. Menindaklanjuti temuan supervisi dengan pembinaan atau pelatihan lanjutan.
 6. Menjaga Etika Supervisi
 - a. Melakukan supervisi secara objektif, profesional, dan tidak menghakimi.
 - b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama supervisi.
 - c. Bersikap sebagai pembina, bukan sebagai pengawas yang menghukum.
 7. Contoh Bentuk Supervisi BK:
 - a. Supervisi klasikal: mengamati layanan BK di kelas.
 - b. Supervisi individual: pembinaan satu konselor.
 - c. Supervisi kelompok: pembinaan beberapa guru BK dalam satu sekolah/kelompok kerja.
 - d. Supervisi administratif: memeriksa kelengkapan dokumen program BK.

3.3 Dampak Tidak Diterapkannya Manajemen Bermutu Pada Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dan ketersediaan Guru BK di sekolah, namun dapat ditentukan melalui kualitas pelaksanaan layanan BK di sekolah yang mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan BK di sekolah, namun jika layanan BK tidak menerapkan manajemen yang baik, maka akan timbul berbagai dampak negatif yang bisa mempengaruhi efektivitas layanan tersebut, baik bagi peserta didik, guru BK, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Hal ini di dukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Badriyah dkk dimana pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Guru BK di SMK Negeri 1 Cimerak masih jauh dari kata baik belum tergambarnya perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini tentu berakibat pada tingkat kedisiplinan siswa, yang mana masih banyak terlihat kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya mentaati tata tertib dan kedisiplinan sekolah sehingga masih banyak siswa yang tidak mentaati aturan seperti terlambat, membolos, menggunakan seragam tidak sesuai jadwal. Guru BK yang seharusnya memberikan peran sebagai fasilitator dengan pelaksanaan kegiatan BK yang seharusnya dapat mencegah dan mengatasi persoalan tersebut serta menjadi penasehat, pada faktanya

masih belum paham tugas dan fungsinya sebagai Guru BK serta kerjasama dengan kepala sekolah dan Guru juga masih belum optimal.²⁶

Pelaksanaan layanan BK yang belum termenajemen dengan baik tentunya akan semakin memperkuat miskonsepsi siswa, personil sekolah bahkan masyarakat terhadap kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah sebagaimana hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Khairi dkk menjelaskan masih terdapat banyak siswa yang takut terhadap Guru BK karena mereka menganggap siswa yang ikut serta dalam kegiatan BK adalah siswa yang bermasalah saja, hal ini mengapa bisa terjadi karna Guru BK hanya melakukan kegiatan BK yang sifatnya insidental saja tanpa mempunyai program yang jelas di setiap tahunnya²⁷ Tanpa adanya manajemen yang baik maka kegiatan BK di sekolah akan menjadi tidak terarah, tidak terencana dan tidak terstruktur. hal ini akan berdampak pada tujuan dari setiap layanan yang tidak akan tercapai, program BK tidak sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga waktu akan terbuang sia-sia tanpa memberikan kebermanfaatn. Adapun dampak lainnya yang akan terjadi menurut wardan dapat diuraikan sebagai berikut:²⁸

1. Kurangnya kepuasan peserta didik, Siswa akan merasa layanan BK tidak membantu atau tidak relevan dengan masalah yang mereka hadapi. Sehingga dapat mengakibatkan Ketidakpercayaan terhadap guru BK serta menurunnya partisipasi siswa dalam layanan BK.
2. Tidak adanya program yang terstruktur, hal ini akan mengakibatkan kegiatan BK di sekolah berjalan tumbang tindih dengan kegiatan lainnya sehingga Guru BK akan di anggap tidak professional dalam penyelenggaraan kegiatan BK.
3. Kesulitan dalam mengevaluasi kegiatan sehingga tidak mempunyai acuan untuk melakukan perbaikan serta pengembangan program BK ke depannya.
4. Beban kerja Guru BK yang tidak terdistribusikan dengan baik akan mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang sehingga terjadi menurunnya motivasi kerja Guru BK.
5. Tidak tersedianya data yang valid, hal ini akan mengakibatkan intervensi yang tidak tepat sasaran karena tidak adanya pemetaan masalah siswa yang akurat.
6. Rendahnya citra layanan BK di sekolah, jika layanan BK tidak di manajemen dengan baik maka akan timbul anggapan layanan BK berfungsi sebagai penghukum dan menyidik.

4. KESIMPULAN

Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis merupakan manifestasi dan akumulasi pelayanan bimbingan dan konseling sehingga merupakan salah satu indikator kerja konselor yang meliputi, tahap *planning* (P) yaitu menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan pendukung BK yakni aplikasi instrumentasi sebelum membuat program bimbingan dan konseling, analisis situasi dan kondisi sekolah, penetapan tujuan, jenis layanan, waktu kegiatan, sasaran kegiatan serta ruang BK yang memadai. Tahap *organizing* (O) adanya pembagian tugas dan keterlibatan *stakeholder* dalam kegiatan bimbingan dan konseling, tahap *actuating* (A) pelaksanaan kegiatan BK hendaknya mengacu kepada program yang telah dirancang serta peningkatan professional guru BK sangat penting sebelum melaksanakan layanan BK. Tahap *controlling*

²⁶ Badriyah Badriyah et al., "Peran Guru BK Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di SMK Negeri 1 Cimerak," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 9, no. 1 (2023): 26–32.

²⁷ Khairirani Khairirani, Muhammad Nasir, and Rizky Andana Pohan, "Analisis Miskonsepsi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Dan MAN Idi Rayeuk," *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021): 73–79.

²⁸ Khusnul Wardan, *Bimbingan Dan Konseling*.

(C) dilakukan oleh pengawas internal yaitu kepala sekolah serta pengawas eksternal yakni dari Dinas terkait yang memiliki wawasan yang mendalam terkait bimbingan dan konseling.

REFERENCES

- Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Asni, Asni, Dwi Dasalinda, and Dini Chairunnisa. “Penerapan Fungsi Manajemen Poac (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah.” *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 9, no. 1 (2024): 357–64.
- Badriyah, Badriyah, Daris Susanto, Erpan Fauzi, and Kamaludin Kamaludin. “Peran Guru BK Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di SMK Negeri 1 Cimerak.” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 9, no. 1 (2023): 26–32.
- Depdiknas, R I. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor Dan Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Cipta Jaya, 2008.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Habsy, Bakhrudin All, Laura Maulita Agustin, Dira Anindia Ayu Rosidin, Tabita Tindie Yuliana, Pribadi Wahyu Santiko, and Talitha Hasnabila Firjatullah. “Memahami Konsep Manajemen BK Dengan Melihat Pola Organisasinya Di Sekolah.” *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 329–45.
- Ipah Saripah, Ipah. “Fungsi Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Pesantren Persatuan Islam (Penelitian Di Pesantren Persatuan Islam No 19 Bentar Garut).” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Khairirani, Khairirani, Muhammad Nasir, and Rizky Andana Pohan. “Analisis Miskonsepsi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Dan MAN Idi Rayeuk.” *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021): 73–79.
- Khusnul Wardan, Tri Velyna. *Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: Mujahid Press, 2018.
- Luddin, Abu Bakar M. *Dasar Dasar Konseling*. Perdana Publishing, 2010.
- Mortensen, Donald G, and Allen M Schmuller. *Guidance in Today's Schools*. New York: John Wiley, 1959.
- Mutia, S. “Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Disekolah.” *Intelektualita*, 2021.
- Neviyarni, S. *Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (Konsep, Masalah Dan Solusi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan,” 2023.
- Prayitno. *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling (Pendidikan Profesi Konseling)*. Padang: FIP UNP, 2012.
- Prayitno, H. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan Dan Konseling Disekolah*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2001.
- Saputra, David Adi, Mahfud Ifendi, Ayu Febriyanti Utami, Nur Safitri, St. Maizah, and Juhrika Wulan Syah. “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Mengelola Perpustakaan Di SMK Negeri 2 Sangatta Utara.” *An-Nadzir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 01, no. 01 (2023): 24–37.
- Siraj, S Pd. *Profesi Pendidikan: Tinjauan Teoritik Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2022.
- Sumarto, Sumarto. “Manajemen Konseling Sekolah Dalam Mengatasi Masalah Siswa Di

- Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Hidayatullah Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Pendidikan Guru* 5, no. 1 (2024).
- Sutrino Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Syahri, Lia Mita, Mudjiran Mudjiran, Dina Sukma, and Syahrial Syahrial. "Kesiapan Konselor Dalam Proses Konseling Yang Berhasil." *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 2, no. 2 (2022): 82–91.
- Undang-Undang, R I. *Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Metode Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar*. Bandung: Citra Umbara. Bandung: Cintra Umbara, 2012.
- Wardhani, Nurnaifah Selvia, Euis Farida, and Eka Sakti Yudha. "Profil Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling SMA Di Kota Bandung." *Indonesian Journal of Educational Counseling* 3, no. 2 (2019): 147–54.
- Zamroni, Edris, and Susilo Rahardjo. "Manajemen Bimbingan Dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014." *Jurnal Konseling Gusjigang* 1, no. 1 (2015): 0–11.